

**PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
No: 15/PDT.G/2014/PN.RGT.TLK)**

Amanda Namira Yunir

Abstrak

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki prinsip untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Di sektor pertanahan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam sengketa yang akan dibahas dalam jurnal ini, terdapat suatu isu hukum berupa konflik norma, dimana Penggugat belum mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap tanahnya karena sertifikat tanah tersebut masih atas nama Tergugat. Dengan adanya jual-beli tanah, seharusnya telah terjadi peralihan hak atas tanah dari Tergugat ke Penggugat. Peralihan hak atas tanah tersebut seharusnya didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama penjual tanah untuk melakukan kewajibannya agar terciptanya perbuatan hukum jual-beli yang menguntungkan kedua pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini terdapat ketidaksesuaian penyelesaian sengketa menurut Putusan Mahkamah Agung No: 15/Pdt.G/2014/PN.Rgt.Tlk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini.

Kata Kunci : peralihan hak atas tanah, jual beli tanah, sengketa tanah

SETTLEMENT OF LAND REGISTRATION DISPUTES
(Case Study Of Supreme Court Decree No:
15/PDT.G/2014/PN.RGT.TLK)

Amanda Namira Yunir

Abstract

As a rule of law country, Indonesia has principles to guarantee certainty, order, and protection of laws based on truth and justice. To realize these principles, government regulations were issued by law. In the land sector, the government issued several regulations, such as Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. In the dispute which will be discussed in this journal, there is a legal issue in the form of a conflict of norms, in which the Plaintiff has not received legal certainty for his land because the land certificate is still in the name of the Defendant. With the sale and purchase of land, there should have been a transfer of land rights from Defendant to the Plaintiff. The transfer of land rights must be registered by the Conveyancer. This research aims to increase public awareness, especially land sellers, to do their obligations in order to create profitable buying and selling activities that gives benefit for both parties. This research is a juridical-normative legal research, using case approach and statute approach. The results of this study indicate the inconsistency of dispute resolution according to the Supreme Court Decision No: 15 / Pdt.G / 2014 / PN.Rgt.Tlk with the applicable laws and regulations, which will be discussed in this journal.

Keywords: transfer of land rights, sale and purchase of land, land dispute